

JENDELA

Pendidikan dan Kebudayaan

IV / Agustus - 2016



DAFTAR ISI

Sapa Redaksi

Hlm. 03

PIP: Karena Pendidikan adalah Hak Setiap Anak Bangsa

Hlm. 04

Aktivasi KIP



Hlm. 06

Jika Tidak Miliki KIP
Daftarkan Diri ke Sekolah sebagai Calon Penerima PIP

Hlm.10



Ayo Cairkan Dana PIP!

Hlm. 12

Tanya Jawab PIP

Hlm. 17



Aksesibilitas Memeroleh Pendidikan Untuk Anak-anak di Indonesia
Hlm. 28

Senarai Kata Serapan

Hlm. 34



Resensi Buku

Hlm. 26

Mekanisme Pencairan Dana PIP

Hlm. 14



Sembilan Tari Bali Jadi Warisan Budaya Dunia Tak Benda

Hlm. 21

Sapa Redaksi

Sejak diluncurkan pertama kali oleh Presiden Joko Widodo pada November 2014 yang lalu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) konsisten melaksanakan salah satu program prioritas pemerintah, yaitu Program Indonesia Pintar atau disingkat dengan PIP. Program ini menyasar anak berusia 6 sampai 21 tahun yang berasal dari keluarga miskin agar mereka dapat memperoleh pendidikan yang layak.

PIP diwujudkan dalam bentuk Kartu Indonesia Pintar (KIP). Pada 2016, sasaran KIP sebanyak 17.927.308 kartu. Tidak hanya di sekolah formal, para penerima KIP dapat memperoleh manfaat PIP melalui lembaga pendidikan nonformal lainnya, seperti pendidikan kesetaraan, lembaga kursus dan pelatihan (LKP), serta balai latihan kerja (BLK).

Melalui majalah ini, kami ulas secara komprehensif berbagai sisi tentang program yang menjadi bagian dari Nawacita. Ulasan yang kami berikan misalnya, mekanisme penggunaan KIP, cara pencairan, tanya-jawab, dan beberapa hal lain yang juga penting. Termasuk di dalamnya kami sajikan sejumlah infografis menarik yang diharapkan memudahkan pembaca memahami isi majalah ini.

Seperti pada edisi-edisi yang lalu, majalah ini kami perlengkap dengan beberapa rubrik lain yang juga menarik untuk dibaca. Seperti pada rubrik Kebudayaan. Pada bagian ini kami

sajikan artikel tentang sekelumit tari bali yang pada akhir 2015 yang lalu keberadaannya diakui masyarakat internasional karena berhasil ditetapkan dalam UNESCO Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity. Melalui artikel ini, kami berharap masyarakat Indonesia dapat lebih mengenal budaya Indonesia lebih baik lagi.

Di bagian rubrik Perpustakaan, sebuah buku berjudul Konsep Pembiayaan Pendidikan kami sajikan dalam bentuk resensi sehingga dapat memberi gambaran singkat bagi mereka yang tertarik membaca buku bertema pendidikan. Pada bagian infografis di rubrik ini, kami hadirkan kembali sebagai pengingat tentang aturan mengenai Perpustakaan Sekolah. Lewat infografis tersebut, diharapkan keberadaan perpustakaan sekolah telah memenuhi ketentuan yang ada sehingga mampu memberikan pelayanan terbaik kepada penggunanya.

Pada rubrik Kajian, sebuah penelitian tentang faktor-faktor yang memengaruhi aksesibilitas memperoleh pendidikan bagi anak-anak di Indonesia, kami sajikan sebagai pelengkap majalah edisi IV ini. Ada pula “daftar kata serapan” dan “penulisan kata yang tepat” di bagian akhir majalah. Semoga semua yang kami sajikan bermanfaat.

Selamat membaca. Salam.

Redaksi

REDAKSI

Pelindung:

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy

Penasihat: Sekretaris Jenderal, Didik Suhardi

Penanggung Jawab: Asianto Sinambela

Pemimpin Redaksi: Eka Nugrahini

Redaktur Pelaksana: Emi Salpiati

Staf Redaksi: Ratih Anbarini, Aline Rogeleonick, Desliana Maulipaksi, Agi Bahari, Gloria Gracia, Seno Hartono

Fotografi, Desain & Artistik: BKLM

Sekretariat Redaksi:

Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat (BKLM),

Kemendikbud, Gedung C Lantai 4,

Jln. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta,

Telp. 021-5711144 Pes. 2413

 kemdikbud.go.id

 [Kemdikbud.RI](https://www.facebook.com/kemdikbud.RI)

 @kemdikbud_RI

 KEMENDIKBUD RI





Foto: Dok. Lomba Foto Pendidikan 2012 Kategori Umum.

Program Indonesia Pintar Karena Pendidikan adalah Hak Setiap Anak Bangsa

Kebutuhan akan pendidikan tidak hanya bagi mereka yang mampu, baik secara materi, fisik, kondisi sosial budaya, dan lainnya. Pendidikan menjadi hak setiap anak bangsa yang wajib dipenuhi oleh pemerintah. Melalui Program Indonesia Pintar (PIP), diharapkan semakin banyak anak usia sekolah yang memperoleh pendidikan, tidak hanya di jalur formal namun juga di jalur nonformal. Tahun 2016 ini, PIP menyasar 17,9 juta anak.

Program Indonesia Pintar (PIP) yang menjadi bagian dari pelaksanaan Nawacita sebagai program prioritas pemerintah diluncurkan pertama kali oleh Presiden Joko Widodo pada akhir 2014 lalu. Sasarannya adalah anak-anak usia 6-21 tahun yang memenuhi kriteria. PIP sendiri adalah program bantuan berupa uang tunai dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang orang tuanya tidak atau kurang mampu membiayai

pendidikan anaknya. Mereka yang menerima manfaat program ini ditandai dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Program ini mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi. Program ini juga untuk menarik siswa putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikannya agar kembali mendapatkan layanan pendidikan

di sekolah atau lembaga pendidikan lainnya, seperti Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) maupun lembaga kursus lainnya.

Untuk anak-anak putus sekolah, sasaran program ini juga mengarahkan agar mereka kembali bersekolah melalui program pendidikan kesetaraan atau yang biasa dikenal dengan nama Kejar (Kelompok Belajar)



Paket A untuk setara SD, Paket B untuk setara SMP, dan Paket C untuk setara SMA.

Sementara itu bagi mereka yang memenuhi kriteria sebagai anak usia sekolah dari keluarga tidak mampu, namun tidak memiliki KIP, dapat mendaftarkan diri sebagai calon penerima PIP ke sekolah, SKB, PKBM, atau

lembaga kursus/pelatihan. Jika usulan dari lembaga pendidikan disetujui dinas pendidikan setempat, maka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui direktorat teknis terkait menetapkan surat keputusan (SK) penerima dana PIP sesuai data pada Dapodik (Data Pokok Pendidikan). (*)



Program ini bertujuan untuk



Meningkatkan akses bagi anak usia 6 sampai dengan 21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah untuk mendukung pelaksanaan Pendidikan Menengah Universal/Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun.

Meringankan biaya personal pendidikan

Mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (*drop out*) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi.

Menarik siswa putus sekolah (*drop out*) atau tidak melanjutkan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di sekolah/Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)/Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)/Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)/Balai Latihan Kerja (BLK) atau satuan pendidikan nonformal lainnya.

Aktivasi Kartumu untuk Dapatkan Manfaat PIP

Sudah menerima Kartu Indonesia Pintar (KIP)? Jika ya, penting sekali untuk mengaktivasi kartu tersebut. Karena jika tidak diaktivasi, dipastikan penerima KIP tidak akan memperoleh manfaat dari Program Indonesia Pintar (PIP), yaitu berupa bantuan uang tunai yang hanya boleh digunakan membiayai kebutuhan sekolah, baik di lembaga pendidikan formal maupun nonformal lainnya.

Setiap penerima kartu memperoleh bantuan tunai yang berbeda-beda untuk setiap jenjang pendidikan. Untuk tingkat SD/MI sebesar Rp225.000/semester (Rp450.000 per tahun), tingkat SMP/MTs Rp375.000/semester (Rp750.000 per tahun), dan tingkat

SMA/SMK/MA sebesar Rp500.000/semester (Rp1.000.000 per tahun). Sedangkan untuk siswa yang akan lulus (kelas 6, 9 dan kelas 12) hanya menerima manfaat untuk 1 semester saja.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Sesditjen Dikdasmen), Thamrin Kasman, mengatakan, sosialisasi mengenai aktivasi KIP atau penggunaan KIP sangat penting, karena fakta di lapangan masih banyak masyarakat yang tidak



Foto: Figman Sunandar,
Juara I Lomba Foto Kemendikbud 2016 Kategori Wartawan

mengerti cara menggunakan KIP untuk menerima manfaat dari PIP, meski distribusi KIP sudah hampir mencapai 100 persen.

"Ada anak-anak yang pas menerima KIP di dalam amplop, amplopnya langsung disobek lalu mereka langsung berbondong-bondong ke bank, dikiranya (uangnya) bisa langsung dicairkan. Padahal di dalam amplop tersebut tidak hanya terdapat KIP, tetapi juga brosur sosialisasi mengenai cara aktivasi atau penggunaan KIP," ujar Thamrin. Karena itu ia berharap sosialisasi mengenai cara penggunaan KIP dapat dilakukan secara masif dan efektif.

Setidaknya ada enam tahapan aktivasi atau penggunaan KIP agar dapat memperoleh manfaat PIP.

Pertama:

Anak penerima KIP membawa KIP ke sekolah/madrasah/satuan pendidikan formal lain/satuan pendidikan nonformal di mana penerima KIP terdaftar atau akan mendaftar.

Kedua:

Satuan pendidikan atau lembaga pendidikan mencatat informasi anak ke dalam data pokok pendidikan (dapodik) sebagai calon penerima manfaat PIP yang kemudian akan diajukan ke Kemendikbud, Kementerian Agama, atau Balai Latihan Kerja (BLK) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Ketiga:

Kemendikbud, Kemenag, dan Kemnakertrans akan melakukan verifikasi sesuai server dapodik di pusat, kemudian menerbitkan Surat Keputusan (SK) Penetapan Penerima Manfaat PIP, dan mengirimkan daftar penerima tersebut ke bank penyalur yang ditunjuk.



Keempat:

Dinas Pendidikan/Kantor Kemenag Kabupaten/Kota akan mengirimkan surat pemberitahuan dan daftar penerima manfaat PIP ke sekolah/madrasah/lembaga pendidikan lain.

Kelima:

Sekolah/madrasah/lembaga pendidikan lainnyamenginformasikan kepada peserta didik atau orang tua mengenai lokasi dan waktu pengambilan dana bantuan

berdasarkan info dari dinas pendidikan/Kantor Kemenag Kabupaten/Kota dan/atau bank penyalur.

Keenam:

Anak penerima KIP atau orang tuanya dapat mengambil dana bantuan PIP ke bank penyalur dengan membawa surat pemberitahuan atau daftar penerima manfaat PIP.

Thamrin mengatakan, bagi anak penerima KIP yang sudah berusia cukup untuk bekerja, misalnya

18-21 tahun, dan tidak mau mau melanjutkan atau kembali ke sekolah reguler, dapat memilih program pendidikan kesetaraan, lembaga kursus atau pelatihan agar bisa memiliki keterampilan, atau mendaftarkan diri ke Balai Latihan Kerja (BLK) milik Kemnakertrans.

Thamrin menegaskan, sekolah atau lembaga pendidikan lainnya tidak boleh menolak anak penerima KIP yang ingin melanjutkan pendidikannya di

Alur Pemanfaatan

Daftar siswa

Anak yang memiliki KIP dapat langsung **mendaftarkan dirinya** dengan cara melapor ke sekolah atau lembaga pendidikan nonformal. Nama anak akan dimasukkan ke Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebagai dasar pemerintah **mencairkan dana PIP**.



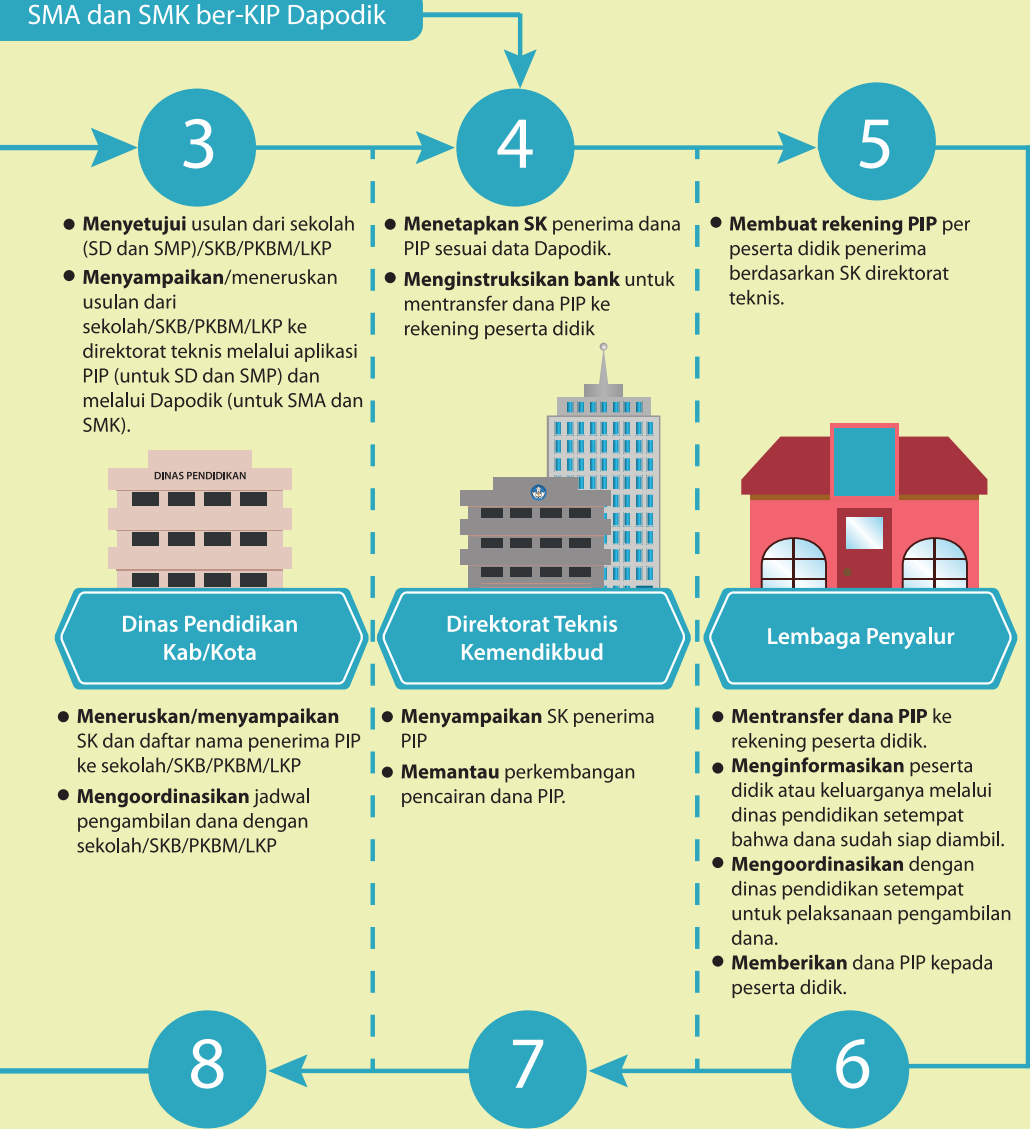
sekolah atau lembaga pendidikan itu. "KIP ini dipegang oleh yang bersangkutan dan berlaku hingga mereka tamat SMA/SMK selama statusnya masih miskin, kecuali ada perubahan status ekonomi," ujarnya. (*)



Foto: Dok. Lomba Foto Pendidikan 2012 Kategori Umum.

PIP bagi yang Memiliki KIP

SMA dan SMK ber-KIP Dapodik



Alur Pemanfaatan PIP

Jika Tidak Memiliki KIP
Daftarkan Diri
ke Sekolah
sebagai Calon
Penerima
Manfaat PIP

Anak yang berasal dari keluarga ekonomi lemah namun tidak memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP) tetap dapat memperoleh manfaat Program Indonesia Pintar (PIP). Caranya dengan mendaftarkan diri ke sekolah atau lembaga pendidikan nonformal lainnya. Dengan mendaftar, maka sekolah akan memasukkan data anak tersebut ke dalam daftar usulan ke Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Data pada Dapodik menjadi dasar penyaluran dana PIP kepada penerima manfaat.



Orang tua dari golongan ekonomi lemah yang memiliki anak usia sekolah, namun tidak menerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) tidak perlu khawatir terhadap kelanjutan pendidikan anaknya. Cukup daftarkan diri anak ke sekolah atau lembaga pendidikan nonformal untuk kemudian diseleksi dan sekolah menyusun peserta didik yang masih aktif sebagai calon penerima dana PIP.

Sekolah berhak menyeleksi calon penerima PIP berdasarkan prioritas seperti yang tertuang dalam petunjuk pelaksanaan PIP

tahun 2016. Prioritas tersebut yaitu, berasal dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH), pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), dan keluarga miskin atau rentan miskin dengan pertimbangan khusus.

Sekolah kemudian menandai status kelayakan peserta didik di aplikasi Dapodik sebagai calon penerima PIP. Selanjutnya dinas pendidikan setempat mengusulkan melalui aplikasi pengusulan PIP dan berdasarkan data hasil verifikasi pada aplikasi

bagi yang Tidak Memiliki KIP



Sumber: Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar 2016

inilah, dinas pendidikan memberikan persetujuan tertulis. Kemudian, menyampaikan daftar peserta didik calon penerima PIP dari sekolah formal maupun lembaga pendidikan nonformal ke direktorat teknis terkait. Data ini merupakan usulan siswa calon penerima dari tingkat sekolah ke direktorat teknis.

Data tersebut kemudian diverifikasi dan kementerian terkait menerbitkan surat keputusan (SK) penetapan penerima manfaat PIP. Selanjutnya, dinas pendidikan

setempat mengirimkan surat pemberitahuan dan daftar penerima manfaat PIP ke sekolah atau lembaga pendidikan lainnya. Sekolah inilah yang menginformasikan kepada siswa mengenai lokasi dan waktu pengambilan dana bantuan PIP. Dana bantuan ini dapat dicairkan dengan membawa surat keterangan dari sekolah. (*)

Ayo Cairkan Dana PIP!

Bagaimana cara mencairkan dana Program Indonesia Pintar (PIP)? Itulah pertanyaan yang sering terlintas di benak para penerima atau pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP). Pada dasarnya proses pencairan atau pengambilan dana PIP dapat dilakukan apabila pemegang KIP membawa bukti pendukung yang sah ke bank penyalur terdekat yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Pengambilan dana PIP ini juga dapat dilakukan perorangan langsung maupun secara kolektif.

Khusus pengambilan dana PIP secara kolektif dapat dilakukan jika berada di wilayah yang sulit untuk mengakses bank penyalur. Kriteria wilayah sulit tersebut meliputi tidak adanya kantor bank di kecamatan dan atau biaya transpor lebih besar dari bantuan yang akan diterima. Pengambilan secara kolektif ini dapat dikuasakan kepada kepala sekolah/ketua lembaga/bendahara sekolah/bendahara lembaga.

Bank penyalur yang mencairkan dana PIP di antaranya Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Nasional Indonesia (BNI). Pemegang KIP dengan jenjang SD/SMP/SMK/Paket A/Paket B/Kursus dapat mencairkan dana PIP di BRI, sedangkan pemegang KIP dengan jenjang SMA/Paket C dapat mencairkannya di BNI. Namun, khusus bagi pemegang KIP dengan jenjang SD/SMP harus didampingi orangtua/wali/guru saat mendatangi bank untuk mencairkan dana tersebut. Selanjutnya, pemegang KIP melakukan aktivasi rekening apabila akan menggunakan tabungan kemudian menandatangani bukti penerimaan dana dan menerima dana PIP tersebut.

Pemegang KIP akan menerima dana sebesar Rp 450.000 per tahun untuk jenjang SD/Paket A, Rp 750.000 per tahun untuk jenjang SMP/Paket B, dan Rp 1.000.000 per tahun untuk jenjang SMA/SMK/Paket C/Kursus. Ayo cairkan dana PIP kamu! (*)



Foto: Dok. Lomba Foto Pendidikan 2013 Kategori Wartawan.

BUKTI PENDUKUNG PENCAIRAN DANA PIP

dari REKENING VIRTUAL



Surat Keterangan Kepala Sekolah/Ketua Lembaga,



Salinan halaman biodata rapor,



Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) orangtua/wali/guru pendamping.

melalui REKENING TABUNGAN



Surat Keterangan Kepala Sekolah/Ketua Lembaga,



Salinan KTP orangtua (bagi pemegang KIP jenjang SMA/SMK/Paket C/Kursus bias menggunakan Kartu Pelajar/KTP/KK),



Salinan Kartu Keluarga (KK),



Surat Keterangan Tambahan dari Kepala Sekolah/Ketua Lembaga untuk menggantikan KTP/KK orangtua/wali jika peserta didik tinggal berjauhan dengan orangtua/wali.

SYARAT PENCAIRAN KOLEKTIF



Surat Keterangan Kepala Sekolah/Ketua Lembaga,



Surat kuasa dari orangtua untuk SD/SMP/Paket A/Paket B atau dari peserta didik untuk SMA/SMK,



Melampirkan dokumen persyaratan pengambilan,



Penerima kuasa membuat Surat Pertanggungjawaban Muilak (SPTJM) bermeterai yang diketahui oleh Ketua Komite dan Pengawas,



Penerima kuasa menunjukkan identitas KTP/SIM asli di bank,



Dana yang sudah cairkan harus segera diberikan kepada peserta didik penerima **paling lambat 5 hari kerja**



Melaporkan pencairan kolektif ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota paling lambat 10 hari kerja.



Sumber: Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar 2016

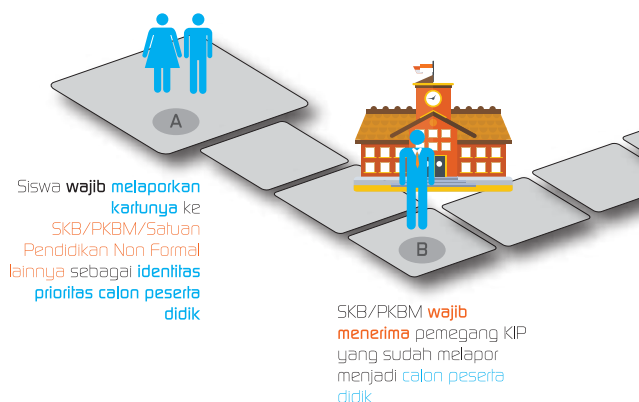
Jika dengan alasan tertentu, misalnya karena usia, tidak dapat diterima di sekolah formal, anak penerima KIP dapat **mendaftar ke satuan pendidikan nonformal**, seperti pendidikan kesetaraan atau lembaga kursus dan pelatihan.

Anak juga dapat memanfaatkan dana KIP dengan mengambil pendidikan di Balai Latihan Kerja (BLK).

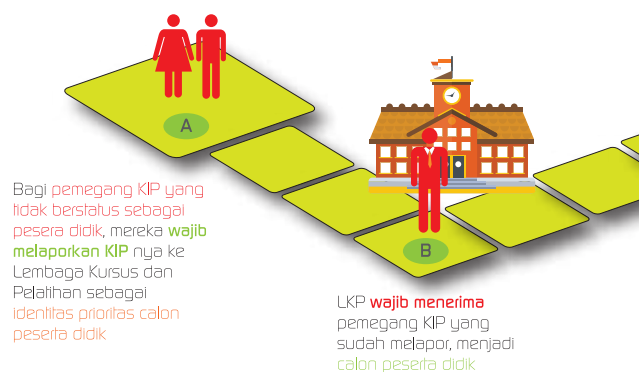
Mekanisme penggunaan KIP

untuk ketiga lembaga pendidikan tersebut dijelaskan pada infografis di samping.

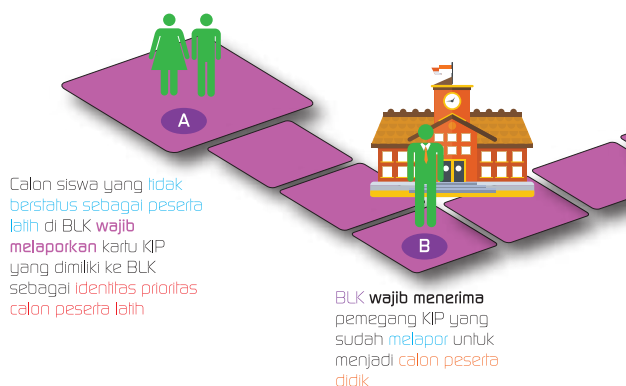
Mekanisme Penggunaan KIP bagi Siswa Pendidikan Kesetaraan (Paket A, B, dan C)

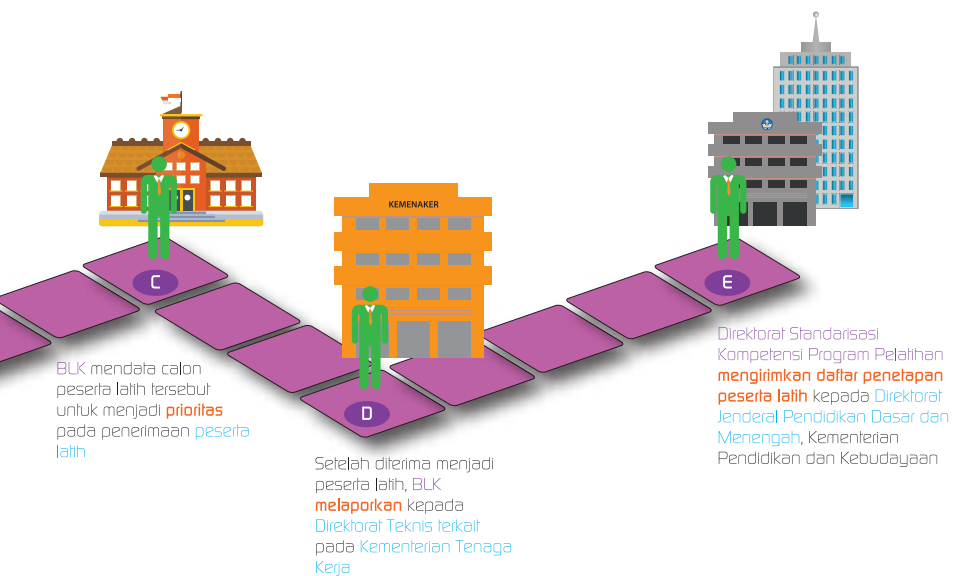
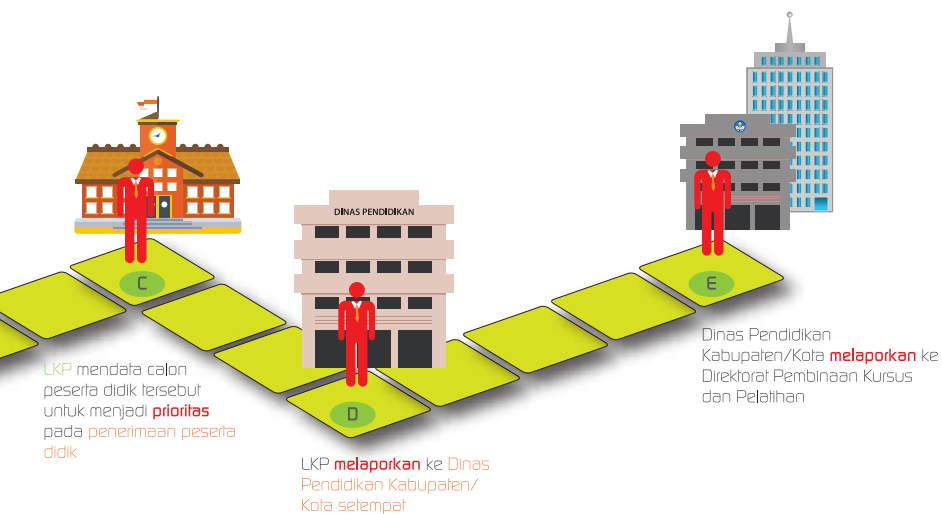
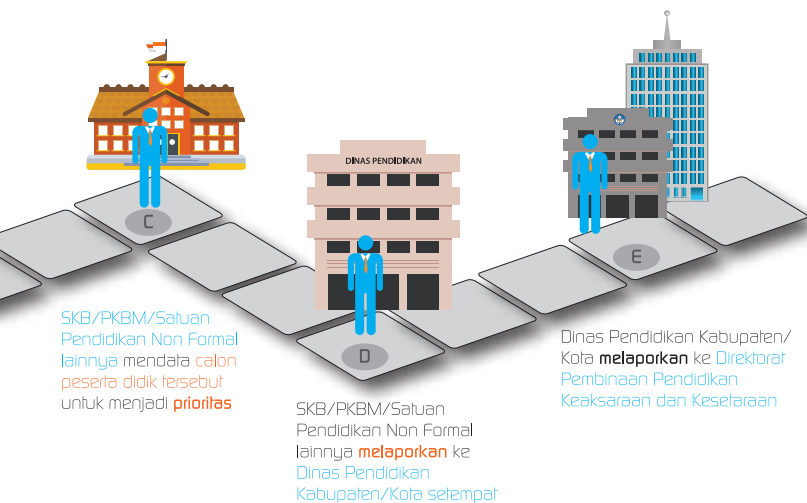


Mekanisme Penggunaan KIP bagi Calon Peserta Didik Pendidikan Kursus dan Pelatihan (LKP)



Mekanisme Penggunaan KIP bagi Calon Siswa yang Berada di Balai Latihan Kerja (BLK)





PRIORITAS PENERIMA PIP

1

Peserta didik dari keluarga pemegang **KIP/KKS/KPS**;

2

Peserta didik dari keluarga peserta **Program Keluarga Harapan (PKH)**;

3

Peserta didik yang berstatus **yatim piatu/yatim/piatu dari sekolah/panti sosial/panti asuhan**;

4

Peserta didik yang terkena dampak **bencana alam**;

5

Peserta didik yang pernah **drop out**;

6

Peserta didik dari **keluarga miskin/rentan miskin** yang terancam putus sekolah atau peserta didik dengan pertimbangan khusus lainnya, seperti:

- Kelainan fisik, korban musibah, dari orang tua PHK, di daerah konflik dari keluarga terpidana, berada di LAPAS, memiliki lebih dari 3 saudara yang tinggal serumah;
- SMK yang menempuh studi keahlian kelompok bidang: pertanian, perikanan, peternakan, kehutanan dan pelayaran/kemaritiman serumah;

7

Peserta pada lembaga khusus atau satuan **pendidikan nonformal** lainnya.



Sumber: Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar 2016

TANYA JAWAB PIP 2016



Tanya Jawab PIP

1. Apa yang dimaksud Program Indonesia Pintar melalui pemberian Kartu Indonesia Pintar?

Program Indonesia Pintar melalui KIP adalah pemberian bantuan tunai pendidikan kepada anak usia sekolah yang berasal dari keluarga kurang mampu, yang merupakan bagian dari penyempurnaan Program Bantuan Siswa Miskin (BSM).

2. Siapa penyelenggara Program Indonesia Pintar melalui KIP?

Penyelenggaranya merupakan kerja sama tiga kementerian yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Sosial (Kemensos), dan Kementerian Agama (Kemenag).

3. Mengapa harus ada pemberian KIP pada Program Indonesia Pintar?

Kartu Indonesia Pintar (KIP) harus diberikan sebagai penanda/identitas untuk menjamin dan memastikan seluruh anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu terdaftar sebagai penerima bantuan ini baik melalui jalur pendidikan formal (mulai SD/MI hingga anak lulus SMA/SMK/MA) maupun melalui jalur pendidikan informal dan nonformal.

4. Apa tujuan dari Program Indonesia Pintar melalui KIP?

1. Meningkatkan akses bagi anak usia 6 sampai dengan 21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah untuk mendukung pelaksanaan Pendidikan Menengah Universal/Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun.
2. Meringankan biaya personal pendidikan.
3. Mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi.
4. Menarik siswa putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di sekolah/Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)/Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)/Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) atau satuan pendidikan nonformal lainnya.

5. Siapa sajakah sasaran penerima manfaat KIP?

Sasarannya merupakan para siswa berusia enam sampai dengan 21 tahun dengan prioritas:

- A. Peserta didik pemegang KIP;
- B. Peserta didik dari keluarga miskin/rentan miskin dan/atau dengan pertimbangan khusus seperti:
 - 1) Peserta didik dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH);
 - 2) Peserta didik dari keluarga pemegang KKS;
 - 3) Peserta didik yang berstatus yatim piatu/yatim/piatu dari sekolah/panti sosial/panti asuhan;

- 4) Peserta didik yang terkena dampak bencana alam;
 - 5) Peserta didik yang tidak bersekolah (drop-out) yang diharapkan kembali bersekolah;
 - 6) Peserta didik yang mengalami kelainan fisik, korban musibah, dari orang tua PHK, di daerah konflik, dari keluarga terpidana, berada di Lembaga Pemasyarakatan, memiliki lebih dari 3 (tiga) saudara yang tinggal serumah;
 - 7) peserta pada lembaga kursus atau satuan pendidikan nonformal lainnya.
- C. Peserta didik SMK yang menempuh studi keahlian kelompok bidang: Pertanian, Perikanan, Peternakan, Kehutanan dan Pelayaran/Kemaritiman.

6. Apa saja persyaratan penerima KIP?

Peserta didik yang berasal dari prioritas sasaran penerima PIP, dapat diusulkan dengan syarat sebagai berikut:

1. Peserta didik Pendidikan Formal:
 - a. Terdaftar sebagai peserta didik di sekolah;
 - b. Terdaftar dalam Dapodik sekolah.
2. Peserta Didik Lembaga Pendidikan Nonformal usia 6 sampai dengan 21 tahun:
 - a. Terdaftar sebagai peserta didik di SKB/PKBM/LKP atau satuan pendidikan nonformal lainnya;
 - b. Terdaftar dalam Dapodik satuan pendidikan nonformal.

6. Bagaimana jika Kartu Indonesia Pintar Hilang?

Seperti yang tertera pada bagian belakang kartu, bahwa kartu menjadi tanggung jawab penerima kartu dan harus dijaga dengan baik. Segala kerusakan dan kehilangan kartu menjadi tanggung jawab penerima kartu, dimana kartu yang hilang tidak bisa digantikan.

7. Bagaimana mekanisme penggunaan KIP?

- a. Siswa yang sudah memiliki KIP membawa kartu tersebut ke sekolah tempat siswa tersebut terdaftar.
- b. Sekolah mencatat data siswa tersebut dengan benar sesuai format, merekapitulasi data semua siswa pemilik KIP dan mengirimkan rekapitulasi tersebut ke Dinas Pendidikan dan Kankemenag Kabupaten/Kota.
- c. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota mengirimkan semua hasil rekapitulasi sekolah di Kabupaten/Kota tersebut ke Kemendikbud dengan menembuskan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi.
- d. Kemendikbud akan menerbitkan Surat Keputusan (SK) Penetapan siswa penerima manfaat KIP dan mengirimkan SK tersebut ke

Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan daftar penerima manfaat KIP ke lembaga/bank penyalur yang ditunjuk.

- e. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota akan mengirimkan surat pemberitahuan dan daftar penerima manfaat KIP ke sekolah serta lokasi dan waktu pengambilan dana bantuan.
- f. Sekolah memberitahukan ke siswa/orangtua waktu pengambilan dana bantuan.
- g. Siswa/orangtua mengambil dana bantuan ke lembaga/bank penyalur yang ditunjuk.

8. Kapan penerima KIP dapat mengambil manfaat dana PIP?

Manfaat program Indonesia Pintar melalui KIP akan disalurkan dua kali dalam satu tahun. Pembayaran untuk Semester I dilakukan pada bulan Agustus/September, dan pembayaran semester II dilakukan pada bulan Maret/April.

9. Bagaimana cara mencairkan manfaat PIP?

Siswa atau orang tua dapat mengambil secara langsung manfaat KIP ke bank penyalur yang ditunjuk. Namun, perlu diingat, siswa harus melapor diri terlebih dahulu ke sekolah atau lembaga pendidikan nonformal agar nama siswa masuk dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

10. Apa Kewajiban Peserta Didik Penerima Dana PIP?

Peserta didik penerima dana PIP mempunyai kewajiban sebagai berikut:

1. Menggunakan dana PIP sesuai dengan ketentuan pemanfaatan dana;
2. Terus bersekolah (tidak putus sekolah) dengan rajin dan tekun;
3. Disiplin dalam melaksanakan tugas-tugas sekolah;
4. Menunjukkan kepribadian terpuji dan tidak melakukan perbuatan yang tercela.

10. Untuk apa sajakah penggunaan Program Indonesia Pintar melalui KIP?

Program PIP ditujukan untuk membantu biaya pribadi peserta didik agar dapat terus melanjutkan pendidikannya sampai selesai jenjang pendidikan menengah. Dana bantuan diberikan langsung kepada peserta didik (sekolah/SKB/PKBM/LKP atau satuan pendidikan nonformal lainnya) untuk pemanfaatan sebagai berikut:

1. Pembelian buku dan alat tulis;
2. Pembelian pakaian dan perlengkapan (sepatu, tas, dll);
3. Transportasi peserta didik;
4. Uang saku peserta didik;
5. Biaya kursus/les tambahan bagi peserta didik pendidikan formal;
6. Biaya praktik tambahan/Penambahan biaya Uji Kompetensi (UJK), jika beasiswa UJK tidak mencukupi/magang/penempatan kerja ke Dunia

Usaha dan Dunia Industri (DUDI) bagi peserta didik pendidikan nonformal.

11. Apa yang harus dilakukan apabila siswa penerima KIP tidak dapat diterima di satuan pendidikan nonformal?

Satuan Pendidikan Non Formal dapat memberikan alternatif dengan memindahkan calon siswa ke Satuan Pendidikan Non Formal terdekat yang lainnya.

12. Siapa yang melakukan Pengawasan dan Pengendalian PIP?

Pengawasan terhadap pelaksanaan PIP dilakukan oleh:

1. Pengawasan internal dapat dilakukan oleh sekolah/lembaga, Komite Sekolah dan Pengawas Sekolah.
2. Pengawasan eksternal dilakukan oleh instansi pengawas antara lain:
 - (a) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),
 - (b) Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
 - (c) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan atau
 - (d) Badan Pengawasan Daerah (Bawasda) Provinsi.

14. Apa sanksi pelanggaran pada pelaksanaan PIP?

Penyalahgunaan wewenang, manipulasi data, pemotongan dana dan tindakan lain yang dapat merugikan negara dan/atau sekolah/lembaga dan/atau peserta didik dalam kaitannya dengan program PIP akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

15. Berapa besaran dana PIP diberikan per peserta didik?

1. Sekolah Dasar (SD)/Paket A:
 - a. Peserta didik Kelas I, II, III, IV dan V Tahun Pelajaran 2015/2016 diberikan dana untuk dua semester sebesar Rp450.000,00;
 - b. Peserta didik Kelas VI Tahun Pelajaran 2015/2016 diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp225.000,00;
 - c. Peserta didik Kelas II, III, IV, V dan VI Tahun Pelajaran 2016/2017 diberikan dana untuk dua semester sebesar Rp450.000,00;
 - d. Peserta didik Kelas I Tahun Pelajaran 2016/2017 diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp225.000,00.
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Paket B:
 - a. Peserta didik Kelas VII dan VIII Tahun Pelajaran 2015/2016 diberikan dana untuk satu tahun sebesar Rp750.000,00;
 - b. Peserta didik Kelas IX Tahun Pelajaran 2015/2016 diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp375.000,00;
 - c. Peserta didik Kelas VIII dan IX Tahun Pelajaran 2016/2017 diberikan dana untuk satu tahun sebesar Rp750.000,00;

- d. Peserta didik Kelas VII Tahun Pelajaran 2016/2017 diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp375.000,00.
3. Sekolah Menengah Atas (SMA)/Paket C:
 - a. Peserta didik Kelas X dan XI Tahun Pelajaran 2015/2016 diberikan dana untuk satu tahun sebesar Rp1.000.000,00;
 - b. Peserta didik Kelas XII Tahun Pelajaran 2015/2016 diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp500.000,00;
 - c. Peserta didik Kelas XI dan XII Tahun Pelajaran 2016/2017 diberikan dana untuk satu tahun sebesar Rp1.000.000,00;
 - d. Peserta didik Kelas X Tahun Pelajaran 2016/2017 diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp500.000,00.
4. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK):
 - a. Program 3 Tahun
 - 1) Peserta didik SMK Kelas X dan XI Tahun Pelajaran 2015/2016 diberikan dana untuk satu tahun sebesar Rp1.000.000,00;
 - 2) Peserta didik SMK Kelas XII Tahun Pelajaran 2015/2016 diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp500.000,00;
 - 3) Peserta didik SMK Kelas XI dan XII Tahun Pelajaran 2016/2017 diberikan dana untuk satu tahun sebesar Rp1.000.000,00;
 - 4) Peserta didik SMK Kelas X Tahun Pelajaran 2016/2017 diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp500.000,00.
 - b. Program 4 tahun
 - 1) Peserta didik SMK Kelas X, XI dan XII Tahun Pelajaran 2015/2016 diberikan dana untuk satu tahun sebesar Rp1.000.000,00;
 - 2) Peserta didik SMK Kelas XIII Tahun Pelajaran 2015/2016 diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp500.000,00;
 - 3) Peserta didik SMK Kelas XI, XII dan XIII Tahun Pelajaran 2016/2017 diberikan dana untuk satu tahun sebesar Rp1.000.000,00;
 - 4) Peserta didik SMK Kelas X Tahun Pelajaran 2016/2017 diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp500.000,00.
5. Lembaga kursus dan pelatihan:
Anak usia sekolah (16 sampai dengan 21 tahun) pemegang KIP yang tidak bersekolah dan sudah mendaftar dan aktif mengikuti pembelajaran di SKB/PKBM/LKP atau satuan pendidikan nonformal lainnya yang terdaftar di bawah binaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, diberikan dana sebesar Rp1.000.000,00 selama mengikuti kursus terstandar dalam satu periode kursus dalam satu tahun tanpa mempertimbangkan lama waktu kursus.

Disarikan dari Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar 2016.

INFORMASI DAN PERTANYAAN KIP

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

- Laman: <http://pengaduanpip.kemdikbud.go.id>
- SMS: 0857-7529-5050 (dengan format: TerimaKIP#Provinsi#Kabupaten#Kota#NomorKIP#NamaPenerima#Sekolah/TidakSekolah)
- LAPOR! lapor.go.id SMS ke 1708 (Ketika: KIP (spasi) Nomor KIP (spasi) isi aduan.

Kementerian Agama

- Laman: <http://indonesiapintar.kemenag.go.id>
- SMS: 0857-7529-5151 (dengan format: TerimaKIP#Provinsi#Kabupaten#Kota#NomorKIP#NamaPenerima#Sekolah/TidakSekolah)



Sembilan Tari Bali
Jadi Warisan Budaya Dunia
Tak Benda

Komite Warisan Budaya Tak Benda *United Nations Educational, Scientific, dan Cultural Organization (UNESCO)* di Windhoek, Namibia, pada sidang ke-10 yang dilaksanakan Selasa 2 Desember 2015 yang lalu, menetapkan tiga genre tari tradisi dari Provinsi Bali yang terdiri dari sembilan tari tradisional Bali ke dalam UNESCO *Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity*.

Inskripsi tiga genre tari tradisi di Bali yang terdiri dari sembilan tarian Bali ke dalam daftar Warisan Budaya Tak benda UNESCO merupakan bentuk pengakuan dunia internasional terhadap arti penting tarian tersebut. Diharapkan inskripsi tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia akan nilai-nilai luhur tarian Bali, serta semangat untuk melestarikannya di masa mendatang.

Sembilan tari tradisional Bali tersebut adalah Rejang, Sanghyang Dadari, dan Baris Upacara yang digolongkan sebagai tarian sakral. Kemudian juga Topeng Sidhakarya, Sendratari Gambuh, dan Sendratari Wayang Wong yang digolongkan sebagai tarian semi-sakral; serta tari Legong Kraton, Joged Bumbung, dan Barong Ket “Kuntisraya”, yang digolongkan sebagai tarian hiburan (entertainment).

1. Rejang

Tari ini digunakan sebagai tari upacara keagamaan, dan diadakan di Pura Merajan atau Sangga. Dalam penataan tari atau koreografinya, tari ini tidak begitu terkait pada pedum karang seperti tarian lain pada umumnya. Sifat dari tari ini adalah fleksibel, dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi, khususnya pada upacara Pangider Buana para penari berputar mengelilingi sajen mengikuti pradaksina.



2. Sanghyang Dadari

Tari ini merupakan salah satu jenis tari sanghyang. Sebuah tarian kerauhan yang ditarikan dalam kondisi kesurupan. Tari ini memiliki tujuan mistis dan tidak ditampilkan di depan umum, serta ditarikan dengan tujuan untuk melindungi desa dari wabah penyakit, bencana alam, dan bencana lainnya. Sanghyang Dadari merupakan tari

peninggalan kebudayaan pra-Hindu yang ditarikan oleh dua orang gadis yang dianggap masih suci.

Uniknya dari tari ini adalah tidak diiringi oleh instrument musik, tetapi diiringi oleh beberapa orang dengan menyanyikan lagu persembahan kepada dewa.

3. Baris Upacara

Tari ini seperti tari-tarian pada umumnya tidak memiliki lakon atau cerita. Pada umumnya tari ini digunakan atau dipertunjukkan untuk Dewa Yadnya. Biasanya pada acara upacara, tari Baris Upacara merupakan simbol Widyadara, Apsara sebagai pengawal Ida Berata sesuhunan turun ke dunia pada saat piodalan

runtutan upacara sebagai pelengkap untuk mendapatkan keyakinan dalam mencapai kearah kesempurnaan dan kesuksesan sebuah yadnya.

5. Dramatari Gambuh

Tari ini memiliki fungsi Gambuh, yakni sebagai Trai Be Bali atau Tari seremonial pengiring upacara di Pura. Dramatari Gambuh

6. Dramatari Wayang Wong

Tari ini merupakan perwujudan dari tari lakon Bali, perpaduan antara tari, drama dan music penarinya diperankan oleh manusia. Tari ini merupakan cabang seni pertunjukan yang bersifat klasik dan satu kesatuan dari tari, tabuh, tembang, dan drama dengan menggunakan



Foto: Dok. Ditjen Kebudayaan

di pura bersangkutan. Tari ini juga berfungsi sebagai pemendak atau penyambut kedatangan para dewa.

4. Topeng Sidhakarya

Tari ini biasanya ditarikan di akhir acara sebagai tanda bahwa tari sacral telah selesai. Dalam acara ritual keagamaan tradisi Hindu di Balli, tari ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan

merupakan tari lakon klasik tertua dalam khazanah tari Bali. Tari ini merupakan bentuk total teater yang memiliki unsur seni, drama, musik, dialog, dan tembang. Tari ini sangat erat hubungannya dengan pelaksanaan upacara-upacara besar. Tarian Gambuh ditarikan pada waktu Ida Bharata turun ke paselang.

tapel, serta memakai cerita atau lakon yang diambil dari lakon Ramayana.

7. Legong Kraton

Tari ini merupakan tari klasik yang melakonkan cerita-cerita zaman dahulu, seperti cerita Prabu Lasem, dengan diperankan oleh tiga orang gadis. Satu orang

berperan sebagai Condong dan kedua lainnya berperan sebagai Legong.

8. Joged Bumbung

Tari ini merupakan salah satu jenis tari Joged yang diiringi dengan gamelan bumbung bamboo. Penari joged pada awalnya menari sendiri yang disebut ngelembur. Setelah itu penari mencari pasangannya seorang laki-laki yaitu salah seorang lelaki yang menonton yang dihipnotis si penari, dan laki-laki itu kemudian diajaknya menari bersama-sama atau diajaknya ngibing. Penari berganti-ganti pasangan yang dipilihnya. Tari Joged ini ada persamaannya dengan tari gandrung.

Dengan inskripsi sembilan tari tradisi Bali tersebut, maka Indonesia telah memiliki tujuh elemen budaya dalam Daftar Warisan Budaya Takbenda UNESCO. Enam elemen yang telah terdaftar sebelumnya adalah Wayang (2008), Keris (2008), Batik

Tari tradisional Bali ini dilakukan oleh penari baik laki-laki dan perempuan yang mengenakan kostum tradisional dengan warna dan aksesoris berwarna cerah dengan garis emas serta motif bunga dan fauna. Tari Bali terinspirasi oleh alam



Foto: Dok. Ditjen Kebudayaan

9. Barong Ket

Tari ini merupakan perwujudan atau prabhawa Sanghyang Tri Murti. Warna topeng atau punggulan berbagai jenis barong yang berwarna merah adalah simbol Dewa Brahma, warna hitam merupakan wujud Dewa Wisnu, sedangkan yang berwarna putih adalah perwujudan Dewa Iswara. Sanghyang Tri Murti yang disimbolkan dengan berbagai jenis barong yang dilawankan dari satu pintu ke pintu yang lain selama 35 hari diyakini dapat melindungi umat manusia, khususnya umat Hindu dari kekuatan merusak yang disebabkan oleh Sanghyang Kala Tiga Wisesa sehingga selamat. Perwajahan Barong pada umumnya merupakan wajah manusia dengan berbagai warna berbeda sebagai simbol tertentu, sedangkan barong ket lebih menyerupai hewan.

(2009), Angklung (2010), Tari Saman (2011), dan Noken Papua (2012). Serta Satu program Pendidikan dan Pelatihan tentang Batik (2009).

Makna Tari

Tari dalam kehidupan masyarakat Bali bukan sekedar sebagai hiburan, tetapi memiliki arti sakral dan merupakan bagian dari kehidupan masyarakat Bali. Ada tiga genre tari

dan melambangkan tradisi tertentu, kebiasaan dan nilai-nilai agama. Dengan gerakan yang dinamis, dan berbagai ekspresi wajah dengan gerakan mata mengungkapkan kebahagiaan, kesedihan, kemarahan, ketakutan dan cinta – semua disertai dengan musik gamelan.

Penari selain harus terampil secara teknis, juga harus memiliki kerendahan hati, disiplin dan terutama adalah taksu (kharisma) yaitu energi spiritual khusus yang menghidupkan tarian. Dalam masyarakat Bali, tarian terutama ditransmisikan secara informal kepada anak-anak sejak usia dini, dalam banjar (kelompok adat).

Pelatihan dimulai dengan gerakan tari dasar dan posisi, kemudian berkembang menjadi tarian yang lebih rumit. Sesi berlanjut sampai siswa telah hafal urutan gerakan. Tarian tradisional Bali memberikan rasa identitas budaya yang kuat didasarkan pada pemahaman bahwa mereka menjaga warisan budaya nenek moyang mereka. [*]

“Dalam menjalani prosesnya peserta didik dijamin mengalami dan mendapatkan kegembiraan yang penuh. Ini bisa terjadi karena dalam desain ini berpegang pada hal yang paling fundamental dalam pendidikan: peserta didik sebagai subjek.”

dalam kebudayaan Bali yang tersebar di 9 kabupaten/kota Provinsi Bali meliputi Kabupaten Karangasem, Klungkung, Bangli, Gianyar, Badung, Tabanan, Jembrana, Buleleng dan Kota Denpasar. Tiga genre tarian ini berlaku di semua wilayah Bali, dengan mengikuti prinsip-prinsip berdasarkan desa (tempat), Kala (waktu), dan patra (acara).

Tiga Genre Dalam Tari Tradisional Bali terdiri dari:



Wali atau Tari Sakral (8-14 Masehi), dipertunjukkan di halaman dalam pura (mandala utama) sebagai bagian dari upacara keagamaan/adat. Yang masuk dalam jenis tari ini antara lain Rejang, Sanghyang Dedari, Baris Upacara.



Bebali atau semi sakral (14-19 Masehi), dipertunjukan di halaman tengah (madya mandala) di Pura-pura di Bali sebagai bagian dari upacara. Tari Bebali biasanya memiliki skenario. Yang masuk dalam genre ini antara lain Topeng Sidhakarya, Dramatari Gambuh, Dramatari Wayang Wong.



Tari Pertunjukan atau Balih-balihan merupakan tipe tari yang muncul di abad 19 sampai saat ini berfungsi sebagai tari pergaulan atau entertainment, ditampilkan di luar halaman pura atau di tempat-tempat pertunjukan lainnya. Yang termasuk genre tari ini adalah Legong Kraton, Joged Bumbung dan Barong.

Resensi Buku

Konsep Pembiayaan Pendidikan



Judul:
Konsep Pembiayaan Pendidikan

Penulis:
Mulyono, MA

Penerbit:
Ar-Ruzz Media,
Yogyakarta

Tahun:
2010

ISBN:
9789792547382

Jumlah Hlm:
296 hlm

Bahasa:
Indonesia

Pembiayaan pendidikan merupakan faktor penting dalam menjamin mutu dan kualitas proses pendidikan. Meskipun pembiayaan tersebut bukan satu-satunya faktor keberhasilan, tetapi tanpa pembiayaan yang cukup maka kualitas pendidikan tidak akan tercapai.

Pembiayaan pendidikan meliputi gaji guru, peningkatan profesional guru, pengadaan ruang belajar, perbaikan ruang, pengadaan alat peraga dan buku pelajaran, ATK, kegiatan ekstrakurikuler, pengelolaan pendidikan serta supervisi pendidikan. Dalam buku ini dibahas tujuh konsep pembiayaan pendidikan yaitu objek biaya, informasi manajemen biaya, pembiayaan, keuangan, anggaran, biaya, dan pemicu biaya.

Selain itu, buku ini juga membahas mengenai model

kajian pembiayaan pendidikan, sistem pembiayaan pada satuan pendidikan, dan pembiayaan pendidikan model BOS dan praktik operasional di lapangan. Bahkan di dalam buku ini diperkuat dengan tabel seperti tabel hubungan biaya dengan hasil NEM SD di Sumatera Barat tahun 2001/2002, tabel realisasi biaya dari anggaran rutin SLTP Negeri 1 Kota Cirebon tahun 2000-2001, dan tabel persentase biaya personel dan sarana/prasarana serta biaya per siswa banding NEM pada

2000/2001 di tingkat SLTP Kota Cirebon guna memperkuat teori-teori yang sudah dijelaskan.

Buku ini tersedia di Perpustakaan Kemendikbud. Anda dapat meminjam buku ini dengan sebelumnya terdaftar sebagai anggota. Untuk mempermudah pencarian, buku ini dapat diakses pada http://perpustakaan.kemdikbud.go.id/cendana/index.php?p=show_detail&id=28430&keywords=konsep+pembiayaan.

Perpustakaan Sekolah

Perpustakaan Sekolah/Madrasah menjadi salah satu elemen penting dalam keberhasilan pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Untuk itu keberadaan perpustakaan di sekolah perlu diperhatikan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.



Perpustakaan Sekolah/Madrasah berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di sekolah/madrasah. (PP 24/2014)



Sekolah/Madrasah mengalokasikan dana paling sedikit 5 persen dari anggaran belanja operasional sekolah/madrasah atau belanja barang di luar belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan perpustakaan. (UU 43/2007)



Setiap perpustakaan sekolah/madrasah memiliki sekurang-kurangnya satu tenaga perpustakaan yang berkualifikasi SMA atau yang sederajat dan bersertifikat kompetensi pengelolaan perpustakaan sekolah/madrasah dari lembaga yang ditetapkan pemerintah



Setiap perpustakaan sekolah/madrasah yang mempunyai jumlah tenaga perpustakaan sekolah/madrasah lebih dari 1 orang, mempunyai lebih dari 6 rombongan belajar, serta memiliki koleksi minimal 1.000 judul materi perpustakaan dapat mengangkat kepala perpustakaan sekolah/madrasah.

Kepala Perpustakaan

27

Kepala Perpustakaan Sekolah/Madrasah yang melalui jalur pendidik kepala perpustakaan sekolah/madrasah harus memenuhi syarat:



Berkualifikasi minimal D4 atau S1.

Memiliki sertifikat kompetensi pengelolaan perpustakaan sekolah/madrasah dari lembaga yang ditetapkan pemerintah.



Masa kerja minimal 3 tahun

Kepala Perpustakaan Sekolah/Madrasah yang melalui jalur kependidikan kepala perpustakaan sekolah/madrasah harus memenuhi syarat:



Berkualifikasi minimal D2 Ilmu Perpustakaan dan Informasi bagi pustakawan dengan masa kerja minimal 4 tahun; atau

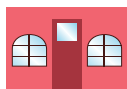


Berkualifikasi D2 non-Ilmu Perpustakaan dan Informasi dengan sertifikat kompetensi pengelolaan perpustakaan sekolah/madrasah dari lembaga yang ditetapkan pemerintah dengan masa kerja minimal 4 tahun di perpustakaan sekolah/madrasah.

Ruang Perpustakaan



Luas minimum ruang perpustakaan sama dengan luas satu ruang kelas. Lebar minimum ruang perpustakaan 5 meter.



Ruang perpustakaan dilengkapi jendela untuk memberi pencahayaan yang memadai untuk membaca buku.



Ruang perpustakaan terletak di bagian sekolah yang mudah dicapai.

Aksesibilitas Memeroleh Pendidikan Untuk Anak-anak di Indonesia

Novrian Satria Perdana, M.E

Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Balitbang-Kemdikbud
E-mail: novrian.satria@kemdikbud.go.id

Indonesia adalah contoh negara berkembang dengan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi namun tingkat pertumbuhan ekonomi masih rendah. Rendahnya pertumbuhan ekonomi salah satunya disebabkan oleh rendahnya kualitas pendidikan masyarakat. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2016 menyebut, hingga tahun 2015 angka partisipasi kasar (APK) jenjang sekolah menengah/ sederajat masih di bawah 80 persen. Ini mengindikasikan partisipasi mengakses pendidikan masih kurang.

Selain itu, masih terdapat kesenjangan yang tinggi terkait partisipasi anak untuk bersekolah antar wilayah (perdesaan dan perkotaan) hingga mencapai 30,14 persen. Masalah lainnya adalah masih banyaknya siswa putus sekolah. Jenjang SD pernah mengalami kenaikan putus sekolah hingga mencapai 25,75 persen, untuk jenjang SMP/ sederajat jumlah angka putus sekolah hingga mencapai 270.296 siswa pada periode tahun 2011/2012-2012/2013, untuk jenjang SMA dan SMK mengalami kenaikan angka putus sekolah hingga mencapai 127.452 siswa SMA dan 171.605 siswa SMK pada periode tahun 2011/2012-2012/2013. Berbagai indikator tersebut menunjukkan masih rendahnya aksesibilitas memperoleh pendidikan bagi anak-anak di Indonesia.

Masih rendahnya aksesibilitas memperoleh pendidikan itu dapat berpengaruh terhadap peringkat Human Development Index (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia, karena salah satu indikator HDI adalah pendidikan. Jika berbagai masalah tersebut tidak segera diselesaikan dikhawatirkan dapat menurunkan peringkat HDI Indonesia. Padahal Indonesia sedang memasuki awal dari era bonus demografi dan diharapkan

pada tahun 2020-2030 merupakan tahun istimewa karena mendapatkan bonus demografi tersebut.

Peringkat HDI Indonesia mengalami pergerakan yang fluktuatif, yaitu dari tahun 2004 mendapatkan ranking 108, tahun 2005 di ranking 107, tahun 2010 di ranking 108, tahun 2012 ranking 124, dan tahun 2015 ranking 110. Peringkat HDI sering dipakai sebagai pertimbangan oleh negara-negara lain dalam pengambilan keputusan, misalnya terkait penanaman investasi. Oleh karena itu, apabila era bonus demografi Indonesia telah tiba, tidak segera dilakukan perbaikan berbagai bidang seperti masalah bidang pendidikan, maka akan berdampak pada rendahnya produktivitas pekerja dan rendahnya investasi asing untuk Indonesia karena peringkat HDI yang rendah.

Melalui penelitian ini, penulis ingin mencari faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap aksesibilitas memperoleh pendidikan bagi anak-anak di Indonesia untuk mencari alternatif kebijakan agar aksesibilitas memperoleh pendidikan terus meningkat hingga jenjang berikutnya.

Aksesibilitas pendidikan adalah

kemudahan yang diberikan kepada setiap warga masyarakat untuk menggunakan kesempatannya memasuki suatu program pendidikan. Akses tersebut dapat berupa sikap sosial yang nondiskriminatif, kebijakan politik dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang mendukung dan mencegah diskriminasi, tersedianya fasilitas



pendidikan yang aksesibel, tersedianya alat bantu belajar/mengajar yang sesuai, dan biaya pendidikan yang terjangkau, yang memungkinkan setiap warga masyarakat menggunakan kesempatannya untuk mengikuti proses belajar/mengajar pada program pendidikan yang dipilihnya.

Teori utama yang mendasari penelitian ini adalah teori Liberal Klasik dari Darwin tahun 1859. Menurut teori ini setiap orang dilahirkan dengan jumlah kapasitas tertentu yang untuk sebagian besar diwariskan dan tidak dapat diubah secara substansial. Dengan demikian, sistem pendidikan harus dirancang sedemikian rupa untuk menghilangkan hambatan apapun termasuk faktor alamiah/takdir anak-anak yang melekat pada dirinya (termasuk latar belakang ekonomi orang tua, jenis kelamin, jumlah anggota keluarga, geografis/keadaan lingkungan) yang menghambat siswa untuk memperoleh pendidikan.

sebanyak 1.372.142 anak. Alasan pengambilan sampel usia 7-18 tahun untuk mengetahui sejauhmana ketercapaian program-program peningkatan akses (hingga jenjang pendidikan menengah) yang dijalankan Pemerintah.

Hasil Penelitian

Menurut Jenis Kelamin Anak

Berdasarkan hasil perhitungan, peluang anak laki-laki usia 7-18 tahun untuk bersekolah lebih rendah 0,03162 kali daripada peluang anak perempuan untuk bersekolah pada rentang usia yang sama. Hasil penelitian ini sejalan dengan keberhasilan Indonesia yang aktif dalam gerakan

mengindikasikan, orangtua mulai menyadari bahwa pendidikan bagi seorang perempuan sangat penting karena kelak mereka akan mendidik anak-anak mereka agar dapat berpartisipasi membangun negara.

Menurut Wilayah Tempat Tinggal

Berdasarkan nilai Marginal Effect After Logit, peluang anak untuk bersekolah pada usia 7-18 tahun yang tinggal di perkotaan sebesar 0,027348. Hasil tersebut menunjukkan bahwa peluang anak untuk bersekolah pada anak usia 7-18 tahun di daerah perkotaan lebih tinggi 0,027348 kali daripada peluang anak pada rentang usia yang sama yang tinggal di daerah perdesaan. Berdasarkan data kondisi fasilitas yang ada di perdesaan yang bersumber dari BPS tahun 2003-2014 menunjukkan bahwasetiap tahunnya peningkatan jumlah desa yang memiliki fasilitas pendidikan yang terbanyak hanya jenjang SD/MI, sedangkan untuk jenjang di atasnya 3 hingga 5 persen per tahun. Pemerintah perlu segera melakukan percepatan pembangunan fasilitas pendidikan di perdesaan agar tidak terjadi kesenjangan yang tinggi dengan wilayah perkotaan.

Menurut Latar Belakang Pendidikan Ibu

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa peluang anak untuk bersekolah dengan latar belakang pendidikan Ibu hingga jenjang pendidikan menengah lebih baik 0,06759 kali daripada peluang bersekolah anak pada rentang usia yang sama dengan latar belakang pendidikan Ibu hingga jenjang pendidikan dasar. Selain itu untuk jenjang pendidikan Ibu yang lebih tinggi menunjukkan hasil bahwa peluang bersekolah anak dengan latar belakang pendidikan Ibu hingga jenjang pendidikan tinggi lebih baik 0,062137 kali daripada peluang bersekolah anak pada rentang usia yang sama dengan latar belakang pendidikan Ibu hingga jenjang pendidikan dasar. Atau dengan kata lain semakin tinggi jenjang pendidikan orangtua maka semakin tinggi aksesibilitas anak terhadap pendidikan.



Foto: Dok. Lomba Foto Pendidikan 2013 Kategori Pelajar

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2014. Unit analisis dalam penelitian ini adalah anak yang berusia 7 tahun hingga usia 18 tahun dan dipilih responden yang menjawab pertanyaan secara lengkap sehingga diperoleh

pengarustamaan gender sejak tahun 1995 yang merupakan salah satu upaya menyetarakan peranan laki-laki dan perempuan. Pengarusutamaan bukanlah tujuan, melainkan proses pembentukan pengetahuan dan kesadaran serta pertanggungjawaban bagi semua tenaga profesional pendidikan untuk mencapai kesetaraan gender dalam pendidikan. Hasil tersebut

Menurut Jarak ke Sekolah Hasil perhitungan menunjukkan bahwa peluang anak untuk bersekolah dengan jarak lokasi ke sekolah yang jauh, lebih rendah 0,077361 kali daripada peluang anak untuk bersekolah dengan jarak ke sekolah yang dekat. Kondisi saat ini berdasarkan data yang bersumber dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2000-2014, rata-rata jarak terdekat/minimal untuk mengakses pendidikan pada jenjang SD/MI yaitu sejauh 1,02 km untuk daerah perkotaan dan sejauh 2 km untuk daerah perdesaan.

Sedangkan untuk jenjang SMP/MTs siswa harus menempuh jarak minimal sejauh 2,4 km untuk daerah perkotaan dan minimal sejauh 3,71 km untuk daerah perdesaan. Untuk menempuh jenjang pendidikan SMA/K, siswa harus menempuh jarak minimal sejauh 3,6 km di daerah perkotaan dan minimal sejauh 6,89 km untuk daerah perdesaan. Melihat kondisi jarak ke sekolah yang jauh dapat menimbulkan biaya tambahan untuk transportasi, apalagi jarak yang jauh banyak ditemukan di perdesaan sehingga harus segera ditangani secara serius oleh Pemerintah di antaranya membangun gedung sekolah satu atap yang bermutu, membuka layanan sekolah terbuka yang bermutu, melengkapi fasilitas sekolah, dan sebagainya agar dapat mengatasi masalah rendahnya partisipasi anak untuk bersekolah hingga perguruan tinggi.

Menurut Usia Perkawinan Orang Tua

Berdasarkan hasil Marginal Effect After Logit, peluang anak untuk bersekolah jika orangtuanya menikah pada usia produktif meningkat sebesar 0,159172 kali dan bila orangtuanya menikah pada usia nonproduktif maka peluang anak untuk bersekolah akan menurun sebesar 0,03174 kali. Hasil tersebut menyimpulkan bahwa menikah pada usia



produktif membuat mereka bersemangat dalam bekerja agar dapat menghasilkan uang yang lebih banyak sehingga mereka memiliki dana untuk menyekolahkan anak-anak mereka hingga jenjang perguruan tinggi.

Kondisi saat ini menunjukkan, persentase penduduk yang menikah usia dini masih tinggi. Ini dibuktikan dari data BPK (2009-2014) mengenai persentase usia pernikahan yang

menyatakan bahwa pernikahan penduduk pada usia di bawah 19 tahun di perdesaan berkisar antara 42 hingga 50 persen, sedangkan pada rentang usia yang sama di perkotaan berkisar antara 30 hingga 40 persen. Selain tingginya persentase pernikahan usia muda, pernikahan pada usia lanjut juga

memiliki persentase yang lebih tinggi. Menikah pada usia nonproduktif (usia dini/tua) membuat mereka kurang produktif dalam bekerja sehingga mendapatkan upah yang sedikit dan hal ini dikhawatirkan

mengganggu kesejahteraan mereka dan akan berimbas pula pada akses terhadap pendidikan anak-anak mereka kelak. Pemerintah melalui BKKBN sebaiknya melakukan sosialisasi dan penyuluhan

untuk masyarakat di Indonesia mengenai anjuran usia pernikahan yang ideal (berumur 21 tahun) dan bahaya pernikahan dini dan usia lanjut bagi kesehatan reproduksi, psikologis dan kesejahteraan keluarga. Selain itu perlu penguatan peran tokoh adat dan tokoh agama sebagai kontrol sosial, penguatan peran

“Masih rendahnya aksesibilitas memperoleh pendidikan dapat berpengaruh terhadap peringkat Human Development Index (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia, karena salah satu indikator HDI adalah pendidikan. Untuk itu, pemerintah perlu segera melakukan perbaikan di bidang pendidikan, sehingga tidak berdampak pada produktivitas pekerja dan rendahnya investasi asing untuk Indonesia karena peringkat HDI yang rendah.”



Foto: Dok. Lomba Foto Pendidikan 2010 Kategori Umum

Pemerintah Daerah dalam hal pengendalian pernikahan dini melalui perencanaan kebijakan dan koordinasi lintas sektor secara intensif.

Menurut Pendapatan per kapita Orangtua

Berdasarkan hasil perhitungan, semakin bertambahnya pendapatan per kapita rumah tangga sebesar Rp 1 juta, maka peluang anak untuk bersekolah akan meningkat sebesar 0,08571 kali, begitu juga sebaliknya jika pendapatan per kapita rumah tangga berkurang sebesar Rp 1 juta, maka peluang anak untuk bersekolah akan menurun sebesar 0,08571 kali. Dapat pula dikatakan semakin bertambahnya pendapatan per kapita orangtua maka semakin besar peluang anak untuk bersekolah. Data BPS tahun 2000-2014 menyebut, pendapatan per kapita rumah tangga yang terendah ada pada rumah tangga buruh tani dan petani gurem, sedangkan yang tertinggi ada pada rumah tangga bukan pertanian golongan atas di kota. Perbedaan pendapatan per kapita di antara rumah tangga buruh tani hingga

rumah tangga bukan pertanian golongan atas di kota mencapai 18 kali lipat.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan

masyarakat Indonesia, saat ini Pemerintah meluncurkan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat. Misalnya untuk Program

Indonesia Pintar, anak dari keluarga kurang mampu diberikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) agar terus dapat memperoleh pendidikan, baik jalur formal maupun nonformal. Selain PIP, untuk mendukung peningkatan partisipasi anak terhadap pendidikan, Pemerintah juga menjalankan program bantuan dana pendidikan, misalnya berupa program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), program Dana Alokasi Khusus Pendidikan (DAK-Pendidikan), Bantuan Pendidikan untuk Mahasiswa Miskin Berprestasi (BIDIKMISI) dan lainnya.

Menurut Jumlah Anggota Rumah Tangga

Berdasarkan hasil perhitungan, jumlah anggota keluarga minimal adalah 3 orang dan yang terbanyak berjumlah 19 orang. Berdasarkan hasil Marginal Effect After Logit, semakin bertambahnya jumlah anggota rumah tangga maka peluang anak untuk bersekolah akan menurun sebesar 0,075926 kali. Begitu juga sebaliknya semakin berkurangnya jumlah anggota rumah tangga maka peluang anak untuk bersekolah akan bertambah sebesar 0,075926 kali. Hasil tersebut menyimpulkan, semakin banyak anggota keluarga, maka beban kehidupan mereka akan semakin besar sehingga berpengaruh terhadap kesejahteraan mereka termasuk

yang seharusnya mereka sisihkan untuk menyekolahkan anak-anak mereka. Kondisi jumlah anggota rumah tangga di Indonesia saat ini

rata-rata jumlah anggotanya bergerak fluktuatif setiap tahunnya. Tahun 2000 dan 2002, misalnya berjumlah 3,9 orang dalam satu keluarga, dengan jumlah anggota terbanyak berada di

“Menikah pada usia nonproduktif (usia dini/tua) membuat mereka kurang produktif dalam bekerja sehingga mendapatkan upah yang sedikit dan hal ini dikhawatirkan mengganggu kesejahteraan mereka dan akan berimbas pula pada akses terhadap pendidikan anak-anak mereka kelak.”

Provinsi Maluku Utara.

Kemudian mengalami penurunan pada tahun 2004 hingga berjumlah 3,7 orang, setelah itu mengalami kenaikan hingga berjumlah 4 orang dalam satu rumah tangga pada tahun 2009 dan kemudian naik kembali menjadi 4,2 orang pada tahun 2013.

Menjaga kesinambungan kehidupan mereka agar tercapai kesejahteraan dengan mengakomodir secara adil beban kebutuhan keluarga perlu untuk dilakukan, terutama dalam hal pendidikan anak-anak mereka.



Foto: Dok. Lomba Foto Pendidikan 2010 Kategori Umum

Saran Kebijakan

Pertama: Dalam upaya mengatasi kemiskinan yang berdampak pada partisipasi bersekolah anak usia 7-18 tahun, Pemerintah telah memberikan berbagai macam bantuan dana, namun sering mengalami kendala dalam hal pendataan, penyaluran bantuan, dan sebagainya. Untuk mempermudah kegiatan pendataan warga miskin, pengorganisasian penyaluran bantuan, evaluasi pelaksanaan bantuan, pemberdayaan masyarakat miskin usia produktif dan sebagainya, sebaiknya Pemerintah mendirikan Lembaga Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (LPTPK) pada tingkat Kabupaten/Kota yang pembentukan dan pertanggungjawabannya langsung kepada Presiden melalui Bupati/Walikota dan diatur dalam Peraturan Presiden.

Kedua: Pemerintah sebaiknya memperbanyak pembangunan sekolah satu atap (SD, SMP, SMK dan PT) yang terintegrasi dalam satu gedung untuk daerah-daerah perdesaan, daerah terdepan, terluar dan terpecil di Indonesia. Untuk jenjang pendidikan menengah dan perguruan tinggi (Universitas/Institut/ Sekolah Tinggi, Politeknik, Akademi dan Akademi Komunitas) difokuskan untuk jurusan yang sesuai dengan potensi di daerah tersebut agar ilmu yang didapatkan dapat langsung diterapkan. Jika pembangunan gedung sulit direalisasikan karena minimnya jumlah anak bersekolah dan kondisi geografis yang tidak mendukung, maka sebaiknya Pemerintah menjalankan program Sekolah Keliling (Pembelajaran bisa di rumah penduduk/tokoh adat/lokasi tertentu) secara gratis (termasuk peralatan pembelajaran).

Ketiga: tingkat partisipasi anak usia 7-18 tahun untuk bersekolah akan menurun jika jumlah anggota rumah tangga bertambah. Oleh karena itu hendaknya Pemerintah menggalakkan kembali program Keluarga Berencana (KB) yang menitikberatkan pada upaya pembentukan keluarga kecil sejahtera agar tercapai peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan kesempatan memperoleh pendidikan.

Artikel selengkapnya kunjungi <http://jurnalidikbud.kemdikbud.go.id/index.php/jpnk/article/view/191>

Penulisan kata yang tepat

Tidak Baku	Baku	Arti
Handal	Andal	a 1 dapat dipercaya; 2 memberikan hasil yg sama pd ujian atau percobaan yg berulang;
Hutang	Utang	n 1 uang yg dipinjam dr orang lain: membayar -- di bank; 2 kewajiban membayar kembali apa yg sudah diterima
Hembus	Embus	v 1 bertiup (angin dsb): angin pagi mulai ~; 2 keluar ditiupkan (ft napas, udara dr mulut, dsb): napasnya sudah tidak ~ lagi;
Resiko	Risiko	n akibat yg kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dr suatu perbuatan atau tindakan: apa pun -- nya, saya akan menerimanya; dia berani menanggung -- dr tindakannya itu
Milyar	Miliar	num seribu juta
Survey	Survei	n 1 teknik riset dng memberi batas yg jelas atas data; penyelidikan; peninjauan: hasil -- tanah di daerah itu membuktikan bahwa tanah itu mengandung bijih besi; 2 pengukuran (tanah);
Perduli	Peduli	v mengindahkan; memperhatikan; menghiraukan: mereka asyik memperkaya diri, mereka tidak -- orang lain yg menderita;
Komplek	Kompleks	n himpunan kesatuan; kelompok: -- perumahan rakyat; a 1 mengandung beberapa unsur yg pelik, rumit, sulit, dan saling berhubungan: masalah yg dihadapinya sangat -- dan sulit dipecahkan; 2 sistem gagasan yg tertekan atau dikuasai oleh emosi sehingga dapat menimbulkan tingkah laku yg tidak wajar;
Nasehat	Nasihat	n 1 ajaran atau pelajaran baik; anjuran (petunjuk, peringatan, teguran) yg baik: lebih baik aku turuti -- ibu; beroleh -- dr kepala kantornya; 2 ibarat yg terkandung dl suatu cerita dsb; moral: cerita itu mengandung -- bagi kita sekalian;
Bis	Bus	n kendaraan bermotor angkutan umum yg besar, beroda empat atau lebih, yg dapat memuat penumpang banyak;
Contek	Sontek	v mengutip (tulisan dsb) sebagaimana aslinya; menjiplak: krn malas belajar, setiap ujian ia selalu -;
Analisa	Analisis	n 1 penyelidikan thd suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yg sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dsb); 2 Man penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antarbagian untuk memperoleh pengertian yg tepat dan pemahaman arti keseluruhan; 3 Kim penyelidikan kimia dng menguraikan sesuatu untuk mengetahui zat bagiannya dsb; 4 penjabaran sesudah dikaji sebaik-baiknya; 5 pemecahan persoalan yg dimulai dng dugaan akan kebenarannya;

Senarai Kata serapan

Branding

Padanan:
Penjenamaan
bidang Ilmu:
Pemasaran

Heritage Building

Padanan:
Bangunan Warisan
Bidang Ilmu:
Kebudayaan

Front Liner

Padanan:
Garda Depan;
Penjaga Lini Depan
Bidang Ilmu: sosiologi

E-procurement

Padanan:
Pengadaan-el
Bidang Ilmu:
Teknik Informasi

MONEY GAME

Padanan:
Permainan uang
Bidang Ilmu:
Keuangan

Low-end

Padanan:
Murah meriah
Bidang Ilmu:
manajemen

Copywriter

Padanan:
Penulis Naskah Iklan
Bidang Ilmu:
Komunikasi Massa

HAND BOUQUET

Padanan:
buket Tangan
Bidang Ilmu: Seni

One Stop Living

Padanan:
Permukiman serba-ada
Bidang Ilmu: Sosiologi

Master Chef

Padanan:
Koki utama;
Juru masak utama
Bidang Ilmu:
tata Boga

fish bowl

Padanan:
Akuarium bulat
Bidang Ilmu:
Perikanan

Lipsync

Padanan:
Suai bibir
Bidang Ilmu:
Komunikasi massa

LAYANAN & INFORMASI PROGRAM INDONESIA PINTAR:

Pengaduan terkait permasalahan KIP dapat disampaikan ke Direktorat Teknis melalui unit pengaduan khusus Program Indonesia Pintar:

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

- Laman: <http://pengaduanpip.kemdikbud.go.id>
- SMS: 0857-7529-5050 (dengan format: TerimaKIP#Provinsi#Kabupaten#Kota#NomorKIP#NamaPenerima#Sekolah/TidakSekolah)
- LAPOR! lapor.go.id SMS ke 1708 (Ketika: KIP (spasi) Nomor KIP (spasi) isi aduan.

Kementerian Agama

- Laman: <http://indonesiapintar.kemenag.go.id>
- SMS: 0857-7529-5151 (dengan format: TerimaKIP#Provinsi#Kabupaten#Kota#NomorKIP#NamaPenerima#Sekolah/TidakSekolah)



Terima Kasih **Anies Baswedan**,
Selamat Datang **Muhadjir Effendy**

Selamat Bekerja

melanjutkan estafet kepemimpinan
di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

ISSN: 2502-7867



9 772502 786034